

PERAN SATUAN KOMANDO KEWILAYAHAN PADA KEGIATAN MITIGASI BENCANA BANJIR DI WILAYAH KERJA KODIM 0616/INDRAMAYU

THE ROLE OF TERRITORIAL COMMAND ON THE MITIGATION OF THE FLOOD DISASTER AT THE TERRITORY OF KODIM 0616/INDRAMAYU

Hari Arif Wibowo¹

Universitas Pertahanan
(eral_makavia@yahoo.co.id)

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kodim 0616/Indramayu pada penanggulangan bencana banjir, terutama pada tahap pra bencana dalam kegiatan mitigasi bencana non struktural. Mengingat pelaksanaan tugas Kodim 0616/Indramayu pada penanggulangan bencana mengacu pada UU nomor 34/2004 tentang TNI, khususnya pada pasal 7 ayat 2 (b) (12) yang berbunyi bahwa TNI membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan. Harapannya TNI tidak hanya digunakan untuk menanggulangi akibat bencana alam saja, namun lebih jauh TNI dilibatkan pada semua tahap manajemen penanggulangan bencana, yaitu mulai dari tahap pra bencana sampai dengan pasca bencana, mengingat TNI memiliki kemampuan memberikan bantuan terkait hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, adapun pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, yang dilakukan terhadap 7 (tujuh) informan, yaitu Komandan dan Staf Kodim 0616/Indramayu, Bupati, Kepala Pelaksana BPBD, tokoh pemuda Indramayu serta Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB, selain itu juga melalui observasi serta studi pustaka untuk memperoleh data guna dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kodim 0616/Indramayu belum dapat mengoptimalkan perannya pada kegiatan mitigasi bencana banjir di wilayah kerjanya. Faktor penghambat yang ditemukan adalah UU nomor 34/2004 tentang TNI belum mengatur pelibatan satuan TNI pada tahap pra bencana, keterbatasan kualitas prajurit Kodim dalam mempengaruhi masyarakat Indramayu untuk menjadi masyarakat sadar bencana dan faktor anggaran yang terbatas. Selanjutnya terdapat faktor pendukung yaitu tugas penanggulangan bencana sejalan dengan tugas Binter yang merupakan fungsi utama TNI AD, Organisasi Kodim menjangkau sampai tingkat Desa melalui Babinsa yang setiap saat berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai lapisan, serta tidak adanya resistensi terhadap peran yang dilaksanakan oleh Kodim 0616/Indramayu tersebut.

Kata kunci: Banjir, peran Kodim, mitigasi bencana.

Abstract: *The purpose of this research the role of engagements Kodim 0616/Indramayu about the management of flood disaster relief, especially on the pre disaster stage on the mitigation of the non structural disaster. According the implementation of the duty of Kodim 0616/Indramayu on the disaster management refers to UU No 34/2004 about TNI, especially in article 7, paragraph 2b (12) which says that it helps peoples for handling the consequences of the natural disaster, evacuation and the provision of the humanitarian assistance. Hopefully TNI is not only used to overcome the consequences of the disaster, but also being involved in all of the management stage of the disaster, further which is starting with pre disaster until the after of disaster. Considering that it has the*

¹ Penulis adalah alumni Prodi Strategi dan Kampanye Militer, Fakultas Strategi Pertahanan Univ. Pertahanan Indonesia tahun 2017, Cohort-5. Penulis adalah lulusan Akademi Militer tahun 1992 dan saat ini sebagai Staf Ahli Pangdam XVI/Ptm bidang Hukum dan Humaniter.

ability for helping those thing. This research uses qualitative method, therefore in depth interview is the way to collect the data, had be done by seven peoples, they are Commandan and staf of Kodim 0616/Indramayu, Regent, head of BPBD, Youth figures of the Indramayu and also Director of risk reduction of BNPB, is also going through the observation and literature studies for obtain data to be analyzed qualitatively. The result of this research of the study indicate Kodim 0616/Indramayu has not been able to optimize its role in flood mitigation activities in its area of responsibility. The obstacle that is found is actually the UU No 34/2004 about TNI has not arranged the involvement of the TNI on the pre disaster stage, the limitation of the Kodim's soldiers quality in affecting the Indramayu society into a disaster conscious society and also limited budgetary factors. The supporting factors, which are the task of the disaster management is parallel to the task of Pembinaan Teritorial (Binter) which is the main function of TNI AD, the organization of Kodim can be reach the village level through the Babinsa who can interact to the society in each level any time, and also there is no resistant to the role that Kodim 0616/Indramayu.

Key words: Flood, Kodim's role, mitigation of disaster.

Pendahuluan.

Negara RI secara geografis terletak pada daerah perbenturan 3 lempeng besar kerak bumi yaitu lempeng Samudera Hindia-Australia, lempeng Samudera Pasifik, dan lempeng Eurasia, kemudian negara Indonesia juga berada pada jalur gunung api.² Disisi lain dibeberapa daerah di Indonesia juga rawan terhadap terjadinya bencana alam lain diantaranya dapat berupa banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan, tsunami dan lain-lain. Hal tersebut menyebabkan negara Indonesia rawan terhadap terjadinya bencana. Adapun bencana yang terjadi secara langsung akan berdampak pada jatuhnya korban jiwa, hilangnya harta benda dan dampak

lain yang lebih kompleks seperti lumpuhnya perekonomian daerah bahkan perekonomian negara bila skala kejadian bersifat nasional serta dampak yang luas pada kehidupan sosial masyarakat.

Terkait dengan ancaman bencana tersebut diatas, dapat dijelaskan kaitannya dengan TNI, dimana TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan, dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan politik negara. Sesuai yang tercantum dalam Doktrin Pertahanan Negara, bahwa pertahanan negara diselenggarakan untuk menghadapi setiap bentuk ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Selanjutnya dijelaskan bahwa berdasarkan jenisnya ancaman digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu Ancaman Militer, yang bentuknya berupa agresi dan bukan agresi yang terdiri dari pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata,

² Syamsul Ma'arif, Kalakhar Bakornas, Bahan ceramah Pasis Dikreg XLV, Seskoad, tgl 26 April 2007.

ancaman keamanan laut dan yuridiksi nasional Indonesia serta konflik komunal. Kemudian Ancaman Non Militer, yang bentuknya berupa ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, legislasi dan berdimensi keselamatan umum.³ Pada ancaman berdimensi keselamatan umum yaitu berupa bencana alam atau bencana akibat ulah manusia (*natural or man-made disaster*), kecelakaan transportasi dan permasalahan sosial. Ancaman bencana alam dapat terjadi karena letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami dan banjir.

Dijelaskan dalam Doktrin TNI “Tri Dharma Eka Karma”⁴ bahwa TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya dilaksanakan melalui Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), bahwa dukungan OMSP yang diberikan TNI dilaksanakan melalui tugas pembantuan TNI yang diselenggarakan atas dasar permintaan dan keputusan politik pemerintah atau bila penyelenggaraan pembantuan tersebut atas dasar inisiatif TNI harus melalui mekanisme dan persetujuan Presiden. Salah satu tugas dari 14 (empat belas) tugas dalam OMSP diantaranya digunakan untuk membantu

menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki TNI berupa kemampuan dukungan operasional yang meliputi kemampuan dukungan OMSP.

Selanjutnya di dalam UU RI nomor 24/2007 tanggal 26 April 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi, namun di dalam UU tersebut belum secara tegas menjelaskan peran dan tugas TNI pada penanggulangan bencana alam. Termasuk di dalam penjabaran UU penanggulangan bencana alam tersebut pada Peraturan Presiden nomor 8/2008 pada Bab II tentang organisasi BNPB serta jabaran lebih lanjut pada Peraturan Kepala (Perka) BNPB nomor 1/2008 pada Bab II tentang organisasi dan tatakerja BNPB, tidak ada klausul yang menyebutkan peran / tugas TNI. Terdapat ketidaksinkronan antara UU RI nomor 34/2004 tentang TNI dengan UU RI nomor 24/2007 tentang penanggulangan bencana, dimana pada UU tentang TNI,

³ (2014:26-38)

⁴ (Mabes TNI:2012)

satuan TNI dilibatkan untuk menanggulangi akibat bencana alam, sedangkan di dalam UU penanggulangan bencana, TNI tidak mendapatkan porsi sesuai tugas dan kemampuannya.

Terkait dengan lokus penelitian yaitu berada di Kab. Indramayu yang juga merupakan wilayah tanggungjawab Kodim 0616/Indramayu dalam bidang pertahanan, selanjutnya perlu peneliti jelaskan secara garis besar tentang kondisi wilayah lokasi penelitian tersebut sebagai gambaran fakta di lapangan, bahwa Kab. Indramayu letaknya di pesisir utara Pulau Jawa, secara geografis berada pada posisi 107°52'-108°36' BT dan 6°15'-6°40' LS, dengan luas wilayah 209.599,65 ha, wilayah daratan merupakan dataran rendah (0-18 m dpl) dimana 96,03% dari total luas wilayah ketinggiannya hanya 0-6 m dpl dengan panjang pantai sepanjang 147 km, dimana sepanjang 70 km pantai terkena abrasi laut di antaranya tersebar di Kec. Juntinyuat, Krangkeng, Indramayu, Pasekan, Losarang, Kandanghaur, Sukra dan Patrol,⁵ sehingga untuk wilayah di pesisir Pantura, rentan terkena banjir rob, disisi lain letak Kab. Indramayu berada di bagian DAS (Aliran Aliran Sungai) Cimanuk dan Cipunegara maka setiap kali

⁵ Bappeda Kab. Indramayu, (2009)

sungai tersebut meluap akan menerjang pemukiman dan pertanian⁶. ditambah dengan kondisi penduduk yang multietnis dan multikultural, terdapat budaya yang mengakar, menganggap sungai sebagai bagian dari halaman belakang, tempat membuang semua sampah dan kotoran, sehingga membuat kanal-kanal di Indramayu sering tersumbat⁷, sehingga sangat riskan terjadi bencana banjir.

Adapun peran Kodim 0616/Indramayu saat ini masih sebatas pada penanggulangan akibat bencana banjir, hal tersebut terkait dengan pelaksanaan tugas TNI yang tertuang di dalam UU RI nomor 34/2004 pasal 7 ayat 2 (b) (12) yang berbunyi bahwa TNI membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan sehingga belum dilibatkan sepenuhnya pada kegiatan pra bencana pada kegiatan mitigasi bencana untuk mengurangi resiko bencana banjir di wilayah tugasnya. Namun harapannya adalah TNI tidak hanya digunakan untuk menanggulangi akibat bencana alam saja, lebih jauh TNI dilibatkan dalam tugas penanggulangan bencana alam pada semua tahap manajemen penanggulangan bencana,

⁶ <https://bandungjawabarat.wordpress.com>

⁷ <https://meneerpanqi.blogspot.co.id>

yaitu mulai dari tahap pra bencana sampai dengan pasca bencana, mengingat TNI memiliki kemampuan memberikan bantuan terkait hal tersebut.

Dapat dijelaskan bahwa mitigasi bencana terdiri dari 2 (dua) bagian: Mitigasi Struktural yaitu merupakan upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi untuk mengurangi kerentanan (*vulnerability*) terhadap bencana dengan cara rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Kemudian Mitigasi non struktural yaitu upaya mengurangi dampak bencana selain dari upaya tersebut diatas. Bisa dalam lingkup upaya pembuatan kebijakan seperti pembuatan suatu peraturan perundang-undangan adalah salah satu bentuk upaya non-struktural di bidang kebijakan. Contoh lainnya adalah pembuatan tata ruang kota dan *capacity building* masyarakat. Ini semua dilakukan untuk, oleh dan di masyarakat yang hidup di sekitar daerah rawan bencana. Hal penting terkait dengan mitigasi bencana pada tahap pra bencana yang ingin diteliti dalam tulisan ini yaitu pelibatan peran Satuan Komando Kewilayahan TNI AD pada tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah terkait

penanggulangan bencana alam, tidak hanya untuk menanggulangi akibat bencana alam, namun lebih jauh Kodim 0616/Imy mengambil peran penting sejak tahap pra bencana yaitu pada kegiatan mitigasi bencana dengan tujuan untuk mengurangi resiko bencana dan dampak bencana alam yang dapat diantisipasi sejak dini. Mengingat Salah satu kelemahan menonjol dalam pemerintahan adalah struktur birokratis, hierarkis dan bersifat *top down* akan membatasi fleksibilitas, hal tersebut terbukti pada kasus gempa Yogya yang terjadi pada waktu libur panjang, dimana kantor Kelurahan dan Kecamatan tutup”. Dalam kondisi bencana alam tersebut, sangat sulit mengharapkan tindakan cepat dari rutinitas birokrasi, yang dibutuhkan adalah kecepatan dalam pengambilan keputusan untuk penanganan, terkait dengan pernyataan tersebut, dihadapkan dengan kecepatan tindakan satuan TNI dalam menghadapi bencana banjir, maka dibutuhkan UU yang tidak saling bertolak belakang dan dapat mengatur dengan tegas peran TNI dalam penanggulangan bencana alam pada semua tahap manajemen bencana.

Selanjutnya menurut Raharja & Eddie⁸ dalam Analisis Implementasi Kebijakan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan Di Provinsi Sumatera Barat, serta Buletin Penelitian Sistem Kesehatan⁹, bahwa pada penanggulangan bencana telah terjadi perubahan paradigma, dari penanganan bencana pada tahap tanggap darurat berubah titik beratnya pada mitigasi bencana, artinya saat ini penyelenggaraan penanggulangan bencana lebih menitikberatkan pada tahap pra bencana daripada tahap tanggap darurat dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Namun keterlibatan masyarakat tidak serta merta dapat tumbuh atas kesadaran sendiri, diperlukan edukasi dari *stakeholder* yang terkait, Salah satu pihak yang dapat membantu mendorong peran masyarakat dalam mitigasi bencana adalah Satuan Komando Kewilayahan dalam hal ini Kodim 0616/Imy, karena memiliki organisasi sampai tingkat desa.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas maka disusun rumusan masalah yang digunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan

penelitian, yaitu Bagaimana peran Kodim 0616/Imy pada kegiatan mitigasi bencana dalam penanggulangan bencana banjir yang selalu berulang di Kab. Indramayu? Dan bagaimana pengaruh faktor pendukung dan faktor penghambat pada peran Kodim 0616/Imy dalam kegiatan mitigasi penanggulangan bencana banjir di wilayahnya?

Kerangka Pemikiran

Bahwa dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Indonesia, TNI AD dan satuan jajarannya terlibat aktif pada pelaksanaan tugas tersebut. Adapun salah satu dasar yang digunakan oleh jajaran TNI AD adalah UU no 34/2004 tentang TNI, yang di dalamnya mengamanatkan tugas-tugas TNI dijalankan dengan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Adapun salah satu tugas dari 14 tugas dalam OMSP adalah TNI memberikan bantuan penanggulangan akibat bencana alam. Walaupun di dalam UU no 24/2007 tentang penanggulangan bencana belum secara tegas menjelaskan peran TNI di dalamnya, namun fakta di lapangan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana alam TNI sebagai subyek yang dominan, hal tersebut didasarkan pada hasil kajian Tim

⁸ Raharja, Eddie, (2009) dalam Analisis Implementasi Kebijakan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan Di Provinsi Sumatera Barat

⁹ Buletin Penelitian Sistem Kesehatan (2012: 92)

Analisa dan Evaluasi Penanggulangan Bencana Kemenkumham RI (2011:2) yang menjelaskan bahwa UU Penanggulangan bencana sama sekali tidak menyebutkan peran penting TNI sebagai bagian vital dalam penanggulangan bencana serta hubungannya dengan BNPB, pada faktanya, peran TNI di lapangan sangat dominan, demikian juga Badan SAR dan Institusi lain. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya TNI mendasari UU no 34/2004 yaitu memberikan bantuan penanggulangan akibat bencana alam yaitu pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana, disisi lain didasarkan pada kemampuannya, Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) sebagai bagian dari organisasi TNI memiliki kapasitas untuk melaksanakan tugas bantuan penanggulangan bencana alam pada tahap pra bencana dengan titik berat pada kegiatan mitigasi bencana (non struktural), namun peran tersebut belum dimanfaatkan untuk mengurangi resiko bencana yang dihadapi.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptis analistis dalam menganalisis peran Kodim

0616/ Indramayu pada tahap pra bencana dalam penanggulangan bencana banjir, sumber data yang digunakan adalah data yang didapat secara langsung di lapangan baik terhadap subyek maupun obyek penelitian sebagai data primer dan data-data yang tidak diperoleh secara langsung dan merupakan sumber kedua dan merupakan bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis baik berupa buku, majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi termasuk foto, dimana teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara, observasi, studi pustaka dan studi dokumen.

Analisa dan Pembahasan

Perlu dijelaskan bahwa adanya perubahan paradigma penanganan bencana tersebut, karena munculnya pandangan berbagai kalangan termasuk dikalangan akademisi, bila ditinjau dari penyebab terjadinya bencana adalah tidak semata-mata akibat kejadian alam, namun sebaliknya juga disebabkan oleh ulah manusia. Terdapat penjelasan terkait hal tersebut oleh United Nations International Strategy for Disaster Reduction – UN ISDR (2004) dalam Edi

Nugroho¹⁰, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan bencana adalah sbb:

Pertama. Kerentanan yang tinggi dari masyarakat.

Kedua. Infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kota / kawasan yang berisiko bencana.

Ketiga. Kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat.

Pemerintah melaksanakan perlindungan kepada masyarakat dari kejadian bencana, namun hal tersebut bukan merupakan kewajiban pemerintah semata, saat ini telah berubah menjadi urusan bersama masyarakat. Karena masyarakat bukan menjadi korban pasif yang tidak berdaya, melainkan memiliki kemampuan untuk mengurangi, mencegah serta menanggulangi bencana sesuai kapasitas yang dimiliki masyarakat. Sebagai pembanding antara paradigma konvensional dengan paradigma baru pengurangan resiko bencana, dapat dilihat sesuai Tabel 1.

Dengan adanya perubahan paradigma penanggulangan bencana seperti pada penjelasan tabel di atas, maka partisipasi masyarakat menjadi suatu hal yang penting, mengingat

masyarakat tidak hanya sebagai korban yang tidak berdaya seperti uraian sebelumnya, namun ditempatkan sebagai komunitas yang aktif berperan bersama dengan pemerintah dan *stakeholders* terkait. Tetapi keadaan itu tidak mudah membalikkan telapak tangan, merubah karakter masyarakat yang selama ini pasif menjadi berperan aktif memerlukan upaya yang terencana dari berbagai pihak. Kodim 0616/Indramayu sebagai Satuan Komando Kewilayahan merupakan salah satu alternatif untuk melakukan tugas mitigasi bencana non struktural tersebut, yang secara organisasi memiliki kapasitas untuk melakukannya, seperti yang telah dijelaskan terdahulu dimana Satuan Komando Kewilayahan memiliki organisasi yang terorganisir dengan baik sampai dengan tingkat Desa melalui Bintara Pembina Desa (Babinsa), setiap hari para Babinsa sebagai Pembina di wilayah kerjanya selalu berinteraksi dengan masyarakat, sehingga keberadaan para Babinsa itu dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas kemampuan masyarakat dalam pengurangan terhadap risiko-risiko bencana.

¹⁰ Edi Nugroho 2010 (<http://prb-indo.blogspot.co.id>)

Tabel 1. Perbandingan Paradigma Penanggulangan Bencana

NO	URAIAN	PARADIGMA	
		KONVENSIONAL	PENGURANGAN RISIKO BENCANA
1	2	3	4
1	Bencana	Merupakan kejadian tidak terduga dan tidak dapat dicegah	Merupakan kejadian yang dpt diduga & dicegah, oleh karena nya penting melaks kesiapan utk mengurangi resiko nya.
2	Korban	Masy yang tertimpa bencana adalah korban yang tidak berdaya & penerima bantuan eksternal yang pasif.	Masy yang tertimpa bencana adalah aktor yang aktif untuk membangun kembali kehidupan nya.
3	Penanganan korban	Merupakan tanggung jawab eksternal	Mengutamakan partisipasi masy karena manajemen risiko adalah tugas setiap orang.
4	Penanganan bencana	Fokus pada tanggap darurat, pemulihan fisik, material, material teknis dan sistem keluarga.	Berorientasi sebelum terja dinya bencana yaitu dg melaks pencegahan, mitiga si dan peringatan dini, kesiapsiagaan material, fasilitas, sosial kelemba gaan yang berfokus pd keluarga dan komunitas.
5	Bantuan	- Donor dr pihak lain yg menentukan apa yg masy korban butuhkan - Tujuan mengurangi pende ritaan korban scr seketika dan pemulihan kondisi normal	- Komunitas korban berpar tisipasi buat keputusan dan prioritas kebutuhan, pihak eksternal sebagai fasilitator. - Tujuan kurangi kerentanan dan meningkatkan kapa sitas masy menuju kondisi aman, bencana teratasi dan komunitas kuat.

Sumber: Edi Nugroho, 2010 (telah diolah kembali)

Peran Kodim 0616/Indramayu Pada Mitigasi Bencana Banjir

Sesuai data pada Indeks Risiko Bencana (IRB) BNPB¹¹, bahwa dari 26 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa barat, Skor Risiko Bencana Tahun 2013 di

¹¹ Indeks Risiko Bencana (IRB) BNPB (2013)

wilayah Jawa barat, yang dikeluarkan oleh BNPB menempatkan Kabupaten Indramayu pada urutan 8 dengan skor risiko bencana banjir adalah 175 (Tinggi).

Kodim 0616/Indramayu sebenarnya telah memulai tugas pembantuan kepada Pemerintah daerah Indramayu terkait penanggulangan bencana banjir di wilayah kerjanya, melalui program-program kerja yang ditujukan untuk penanggulangan banjir pada tahap pra bencana, penjelasan informan yang berasal dari Kodim 0616/Indramayu, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut belum rutin dan belum masif dilaksanakan, dengan keadaan tersebut tentunya belum dapat secara signifikan membantu membentuk masyarakat sadar bencana. namun Kodim 0616/Indramayu belum dapat mengoptimalkan realisasi peran pembantuan tersebut, sehingga sasaran peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, belum dapat diwujudkan. Tentu sangat disayangkan potensi besar yang dimiliki oleh Kodim 0616/Indramayu dalam upaya mengedukasi masyarakat untuk peningkatan kapasitasnya sebagai masyarakat yang sadar bencana dan menjadi komunitas aktif dalam pengurangan risiko bencana di wilayah kerjanya tidak dimanfaatkan dengan baik.

Sampai dengan saat ini tidak ada data - data yang menjelaskan bahwa masyarakat resistensi terhadap tugas pembantuan yang diberikan oleh Kodim 0616/Indramayu, dimana perilaku organisasi Kodim 0616/Indramayu dan perilaku seluruh jajarannya dalam konteks organisasi dianggap positif oleh masyarakat, namun sehubungan belum adanya penekanan di dalam UU nomor 34/2004 terkait penanggulangan bencana pada tahap pra bencana adalah merupakan suatu kewajiban kepada TNI dalam hal ini terkait dengan Kodim 0616/Indramayu, sesuai yang dituangkan dalam UU nomor 34/2004 tentang TNI, mengingat pada pasal 7 ayat 2 (b) (12) yang berbunyi bahwa TNI membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan. Dengan adanya klausul yang menyebutkan “Akibat bencana alam ” pada ayat tersebut, menyebabkan tidak adanya dasar kuat yang mewajibkan bagi Kodim 0616/Indramayu dalam melaksanakan secara penuh tugas pembantuan kepada Pemerintah daerah Indramayu, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat pada koridor baru yaitu telah berubahnya paradigma penanggulangan bencana, dimana masyarakat selaku subyek yang penting

dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Indramayu, tugas yang dilaksanakan pada tahap pra bencana baru sekedar dilakukan karena keterpanggilan hati nurani aparat Kodim 0616/Indramayu semata, namun belum melembaga karena tidak adanya tuntutan yang lebih kuat bagi Kodim 0616/Indramayu untuk wajib melaksanakannya. Peran Kodim 0616/Indramayu tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan dari peran instansi lain yang terlibat di dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Indramayu.

Sinergitas Kodim 0616/Indramayu Dengan Pemangku Kepentingan dan Pihak Terkait Lainnya.

Dalam pelaksanaan tugas – tugasnya guna memberikan pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam rangka penanggulangan bencana banjir, diperlukan sinergi yang erat antara Kodim 0616/Indramayu dengan pihak berkepentingan lainnya di wilayah Kabupaten Indramayu. Terkait dengan sinergitas tersebut, Covey¹² mengatakan bahwa kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri-sendiri, selain itu

gabungan beberapa unsur akan menghasilkan suatu produk yang lebih unggul. Oleh sebab itu, sinergitas akan mudah terjadi bila komponen-komponen yang ada mampu berpikir sinergi, terjadi kesamaan pandang dan saling menghargai.

Sinergitas antara elemen sipil dengan satuan jajaran TNI AD pada penanggulangan bencana menjadi perhatian yang dianggap penting karena menyangkut peran yang lebih luas dari TNI AD dalam mengimplementasikan Serbuan Teritorial yang dicanangkan oleh Kasad. Pentingnya sinergitas tersebut menjadi perhatian dan dibahas dalam Seminar Nasional Studi Wilayah Pertahanan oleh Pasis Dikreg LV Seskoad TA. 2017, yang diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober 2017 bertempat di Gedung Merdeka Bandung.¹³ Dalam seminar yang membahas tentang penanggulangan bencana disampaikan pertimbangan pentingnya sinergitas tersebut karena kegiatan penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, diantaranya antara Pemerintah dan TNI AD.

¹² Covey (1999)

¹³ Harian Pikiran Rakyat, 24 Oktober 2017

Wawancara dengan Kasdim 0616/Indramayu menjelaskan adanya kegiatan sinergi antara Kodim dengan beberapa pihak terkait, sbb:

“ Kodim melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang dibuat diantaranya berupa Kegiatan Pembersihan dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan instansi terkait ”.

Hal tersebut diperkuat oleh penjelasan pihak Pemerintah daerah, sesuai dengan hasil wawancara dengan Bupati Indramayu, sebagai berikut:

“ Sinergitas dan kerjasama TNI dan Pemda di Indramayu sangat baik, kami sangat berterima kasih, karena membantu Pemda Indramayu. Selama ini kerjasama berlangsung dengan sangat baik, tidak hanya pada kegiatan penanggulangan banjir saja, pada jaman Dandimnya Letkol Hindro, TNI juga aktif membersihkan pantai kerjasama dengan Pemda, bahkan di desa Dadap pada tahun ini Bapak Panglima, Bapak Gubernur datang ke Indramayu, karena kerjasama yang baik antara TNI dengan Pemda, sebagai salah satu bukti respon yang baik dari Pemda terhadap kinerja TNI, selanjutnya Pemda ingin ada kegiatan kerjasama yang diprogramkan ditingkatkan per tiga bulan, nanti namanya dapat ditentukan, namun programnya seperti TMMD atau BSMSS”.

Instansi yang terlibat langsung dengan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini BPBD Indramayu, juga memberikan penjelasan bahwa kerjasama yang dilakukan selama ini antara BPBD dengan Kodim 0616/Indramayu telah dilaksanakan dengan baik, sesuai hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD, sbb:

“ BPBD Kab. Indramayu apapun kegiatannya selalu melibatkan Kodim 0616/Imy, kemarin ada kegiatan besar yaitu ada tanggul yang rawan jebol, sehingga libatkan 1000 orang termasuk Kodim, dan komandonya dari Kodim untuk memperbaiki tanggul”.

Sesuai pada penjelasan tentang peran Kodim terdahulu sesuai data dari para informan khususnya yang berasal dari internal Kodim 0616/Indramayu, yang menjelaskan kegiatan tersebut belum berlangsung secara masif dan terus menerus, tentunya tidak menguntungkan Kodim 0616/Indramayu dalam memainkan perannya dalam kegiatan mitigasi bencana maupun dampak terhadap masyarakat yang ingin dibentuk karakternya menjadi masyarakat tangguh bencana, mengingat sinergitas yang telah dibangun selama ini mendapatkan respon positif dari berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan

penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Indramayu namun belum menjadi kegiatan prioritas bagi Kodim 0616/Indramayu. Sehingga sangat disayangkan apabila Kodim 0616/Indramayu dalam upaya mendorong peningkatan kapasitas masyarakat menjadi masyarakat yang sadar bencana dan selanjutnya menjadi masyarakat tangguh bencana tidak memberikan kontribusi yang optimal, mengingat Kodim 0616/Indramayu memiliki kapasitas untuk melakukannya.

Faktor pendukung Kodim 0616/Indramayu Dalam Kegiatan Mitigasi Bencana Banjir

Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan faktor pendukung dan faktor penghambat pada pelaksanaan peran Kodim 0616/Indramayu dalam kegiatan mitigasi bencana banjir di wilayah kerjanya, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor pendukung

1.1 Binter sebagai fungsi utama TNI AD.

Sesuai dengan penjelasan pada Doktrin Kartika Eka Paksi tahun 2017 yang menjelaskan bahwa peran TNI AD adalah sebagai alat negara di bidang pertahanan di darat yang didalam menjalankan tugasnya didasarkan pada kebijakan dan

keputusan politik Negara, dengan penjabaran melalui visi yaitu TNI AD yang professional dan dicintai rakyat. Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan tugas-tugasnya TNI AD menyadari sepenuhnya kekuatan hubungan antara TNI AD dengan rakyat, sehingga menempatkan Pembinaan territorial sebagai fungsi utamanya, selain dari fungsi pertempuran dan fungsi pembinaan postur. Terkait dengan hal tersebut dijabarkan melalui program kerja Kodim 0616/Indramayu dalam tugas-tugasnya, yang salah satu aplikasinya adalah pada pelibatan peran Kodim 0616/Indramayu dalam penanggulangan bencana banjir di wilayah kerjanya.

1.2 Organisasi Kodim 0616/Indramayu.

Struktur organisasi Kodim 0616/Indramayu yang menjangkau sampai ke desa-desa melalui jabatan Babinsa sebagai Pembina yang berada di Koramil-Koramil jajaran Kodim 0616/Indramayu. Dimana para Babinsa karena tugas-tugasnya selalu berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai lapisan untuk menjalankan tugas-tugas pembinaan territorial. Keberadaan Babinsa di tengah-tengah masyarakat melaksanakan tugas-tugasnya selaku Pembina Desa dalam rangka memperkuat kemandirian TNI-

Rakyat. Keberadaan Babinsa dapat dioptimalkan dalam rangka membantu tugas penanggulangan bencana pada semua tahapan pada manajemen bencana.

1.3. Tidak Ada Resistensi Terhadap Peran Kodim 0616/Indramayu Dalam Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan hasil penelitian di lokasi penelitian, ditemukan data-data bahwa peran Kodim 0616/Indramayu dalam penanggulangan bencana banjir diterima dan direspon dengan baik oleh berbagai pemangku kepentingan, organisasi masyarakat maupun masyarakat pada umumnya, sehingga secara organisasi, perilaku aparat Kodim 0616/Indramayu maupun perilaku organisasi itu sendiri dapat diterima oleh berbagai kalangan karena dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan dalam penanggulangan bencana banjir.

2. Faktor penghambat

2.1. UU nomor 34/2004 tentang TNI Belum Mengakomodir Tugas Pembantuan Pada Tahap Pra Bencana.

Pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan bencana banjir yang dilaksanakan oleh Kodim 0616/Indramayu utamanya pada kegiatan mitigasi bencana pada tahap pra

bencana, belum dapat dilaksanakan secara terencana dan massif, sehingga hasil yang diharapkan dalam rangka membentuk masyarakat yang sadar bencana guna mewujudkan masyarakat tangguh bencana, dalam rangka pengurangan risiko terhadap bencana dalam jangka panjang sesuai dengan perubahan paradigma penanggulangan bencana, dimana masyarakat adalah sebagai subyek yang berperan aktif, belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya aturan yang mewajibkan Kodim 0616/Indramayu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

2.2. Kualitas Personel Kodim 0616/Indramayu.

Pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara internal maupun bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya lebih mengarah pada pelatihan tugas-tugas pada tahap tanggap darurat. Hal tersebut belum mengarah pada peningkatan kualitas personel maupun organisasi untuk melaksanakan tugas-tugas yang mengarah pada kegiatan mitigasi bencana non struktural, yang lebih fokus kepada kemampuan menyelami, mempengaruhi dan mengajak masyarakat di wilayah kerjanya untuk

mau secara sadar bertindak selaku masyarakat sadar bencana.

2.3. Aspek Anggaran.

Aspek anggaran menjadi hal yang krusial, mengingat pelaksanaan kegiatan sesuai hasil penelitian, harus dilakukan secara terus menerus dan melibatkan banyak masyarakat serta tersebar di seluruh wilayah baik yang terdampak maupun tidak. Anggaran yang tersedia sifatnya terbatas pada kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan sarannya, sedangkan untuk kegiatan dalam rangka tugas mitigasi bencana non struktural belum tersedia.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat dijelaskan bahwa kejadian bencana banjir di Kabupaten Indramayu yang terus terjadi secara berulang setiap tahun, mengingat permasalahan bencana banjir tersebut terjadi tidak hanya akibat dari bencana yang disebabkan oleh faktor alam saja, namun juga ada faktor manusia yang menjadi penyebabnya, dimana di Kab. Indramayu penduduk yang multietnis dan multikultural, memiliki budaya yang tidak baik karena menganggap sungai sebagai bagian dari

halaman belakang, tempat membuang semua sampah dan kotoran serta perusakan tanaman mangrove dilingkungan pantai. Selanjutnya Kodim 0616/Indramayu selaku Komando kewilayahan yang melaksanakan tugas pembinaan teritorial di wilayah tugasnya dengan mengacu pada tugas pada operasi militer selain perang (OMSP), telah terlibat dalam kegiatan penanggulangan bencana bencana banjir tersebut, namun pelaksanaan tugas tersebut belum optimal dilakukan, dengan indikasi belum adanya perubahan pada karakter masyarakat Indramayu untuk menjadi masyarakat yang sadar bencana, dimana masyarakat belum mau berperan aktif bersama para pemangku kepentingan lainnya sesuai paradigma baru penanggulangan banjir yang mendorong peran serta masyarakat di dalamnya.

Setelah melalui penelitian dan analisis serta pembahasan yang telah diuraikan di atas maka saran teoritis sebagai berikut: 1) Perlu dilakukan pengkajian dalam tingkat kebijakan maupun regulasi untuk memberikan dasar pelibatan satuan jajaran TNI dalam operasi militer selain perang terutama dalam operasi penanggulangan bencana pada semua tahapan manajemen

bencana; 2) Perlu penelitian lebih lanjut terkait UU nomor 34/2004 tentang TNI dengan UU nomor 24/2007 tentang penanggulangan bencana, mengingat terdapat ketidaksinkronan/ketidakharmonisan dari kedua undang-undang tersebut khususnya pada pelibatan satuan TNI pada penanggulangan bencana. .

Sedangkan saran praktis sebagai berikut: 1) Untuk menjembatani pelibatan peran Kodim 0616/Indramayu pada penanggulangan bencana banjir khususnya pada kegiatan mitigasi non struktural, Pemkab. Indramayu perlu menyusun Perda penanggulangan bencana banjir yang melibatkan Kodim 0616/Indramayu sejak tahap pra bencana; 2) BPBD Kabupaten Indramayu perlu membuat Protap bersama dalam penanggulangan bencana banjir utamanya pada kegiatan mitigasi non struktural bencana banjir yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan berikut juga Kodim 0616/Indramayu mulai dari tahap pra bencana, tahap tanggap darurat dan pada tahap pasca bencana.

Daftar Pustaka

Buku

Amarulla Octavian, *Militer dan Globalisasi, "Studi Sosiologi Militer Dalam*

Konteks Globalisasi Dan Kontribusinya Bagi Transformasi TNI, Cetakan kedua, UI Press Jakarta, 2012, hal 16.

Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana, *Pengantar Manajemen (3 in 1)*, Cetakan pertama, PT. Pustaka Baru, Kebumen, Januari 2015, hal 36.

Berry, David, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal 105.

Dinas Sejarah AD, *Peranan TNI AD dalam penanggulangan bencana alam tahun 2004-2010*, CV. Prawira, Bandung, 2011, hal 32.

Gerdan, S, *Determination of Dissaster Awareness, Attitude Levels and Individual Priorities at Kocaeli University*, *Eurasuan Journal of Educational Research*, Issue 55, 2014, 159-176.

Herryal Z. Anwar dan Hery Harjono, *Menggapai Cita-Cita Masyarakat Tangguh Bencana Alam di Indonesia*, LIPI, Bandung, 2013, hal 242.

I. A. Widhiyanasari, A.A. Diah Parami Dewi dan G.A.P Candra Dharmayanti, *Jurnal Spektran*, Vol. 5, No. 2, Juli 2017, hal 132.

Jurnal Penanggulangan Bencana alam, BNPB, Jakarta, Vol 6, No 2, 2015 hal. 52-53.

Jurnal Administrasi Publik (JAP), Aditya, B.R., Sarwono dan Rozikin, M. *Sinergitas Stakeholders Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu Yang Demokratis Dalam Perspektif Teori Governance*, Vol 2, No.3, 2014, Hal. 407-413.

Jurnal Riset Kebencanaan Indonesia vol 1 No. 1, 2015.

- Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi revisi, PT. Remaja Rosdakarya Bandung, 2007, hal 6.
- Matsuda, Y., & Okada, N, *Community Diagnosis for Sustainable Disaster Preparedness*, Journal of natural disaster science, Kyoto University, 2006.
- Miftah Thoha, Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya, Fisipol UGM, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 4-5.
- M. Mas'ud Sa'id, Birokrasi Di Negara Birokratis, Makna, Masalah dan Dekonstruksi Birokrasi Indonesia, Cetakan kedua, Januari 2010, hal 32.
- Pemda Kabupaten Indramayu, Indramayu Dalam Angka, 2017.
- Pemda Kabupaten Indramayu, BPBD Kabupaten Indramayu, 2015.
- Pribadi, K., Argo, T., Mariani, A., Parlan, H, *Implementation of Community Based Disaster Risk Management in Indonesia: Progress, Issues and Challenges*, 2011.
- Prof Dr. Afrizal, M. A., Metode Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu, Rajawali Pers, Jakarta 2014, hal 30.
- Roz D and Lasker Elisa S. Weiss, *Creating partnership synergy: The critical role of community Stakeholders*, New York Academy of Medicine, 2003, hal 123.
- Pusat Penelitian Politik LIPI (P2P LIPI), Dinamika Pemikiran Internal tentang Peran dan Fungsi TNI di Era Transisi Demokrasi, Jakarta, 2001.
- Samuel P. Huntington, Mereformasi Hubungan Sipil - Militer dalam Larry Diamond & Marc F. Plattner, Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi, edisi terjemahan, Rajawali Pers, Jakarta, 2003 hal 13.
- Samuel P. Huntington, Prajurit dan Negara, Teori dan Politik Hubungan Militer- Sipil, PT. Gramedia, Jakarta, 2003, hal 477 - 478.
- Sarwono, S.W. Teori-teori Psikologi Sosial. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Sri Widyanoro, et all. "Bencana Kebumihan: Gempa Bumi" Dalam Majelis Guru Besar ITB, Mengelola Resiko Bencana di Negara Maritim Indonesia: Bencana Kebumihan, Kelautan dan Atmosferik, Bandung, 2010, hal 48-52.
- Stephen R. Covey, *The 7 Habits of Highly Effective People (7 Kebiasaan Manusia Yang Sangat Efektif)*, Covey Leadership Center, Edisi Revisi, Binarupa Aksara Publisher, Tangerang, 2013 hal 300.
- Stephen R. Covey , *Principles Centered Leadership*, 1999.
- Sudibyakto Danang Sri Hadmoko, Dyah R Hizbaron, Emy Dwi Suryanti, I Made Susmayadi dan Efrinda Ari Ayuningtyas, Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat di Kawasan Wisata Kotagede, Yogyakarta, Jurnal Riset Kebencanaan Indonesia, IABI, BNPB, 2015, hal 58-66.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung, (2016) Tinjauan Umum Manajemen Bencana, Program Pelatihan Manajemen Bencana, UNDP, 1992.

Waluyo, Manajemen Publik, Forum Inovasi Tata Pemerintahan, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hal 37.

Yusriadi, Aktualisasi Sinergitas Komponen Governance Dalam Peningkatan Pelayanan Pendidikan Kecakapan Hidup di Kota Makassar, Vol.3, No.1, 2016.

Dokumen dan Sumber Lain

Anpotwil Kodim 0616/Indramayu TA. 2017, Maret 2017.

Anpothan Kodim 0616/Indramayu TA. 2017, Maret 2017.

BNPB, Indeks Risiko Bencana BNPB, 2013, hal 87.

Ceramah Kalakhar Bakornas PBP kepada Siswa Seskoad Dikreg XLV, pada tanggal 26 April 2007 Data Babinsa Kodim 1606/Imy per Desember 2016.

Dwi Cahyono, "Persepsi Ketidakpastian Lingkungan, Ambiguitas Peran, dan Konflik Peran Sebagai Mediasi antara Program Mentoring dengan Kepuasan Kerja, Prestasi Kerja dan Niat Ingin Pindah." *Disertasi tidak dipublikasikan*. Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Edi Nugroho, 2010, (<http://prb-indo.blogspot.co.id/2010/06/paradigma-yang-perlu-berubah.html?m=1>), diunduh pd tgl 8 Okt 2017 pkl 13.42 wit)

Gartiria Hutami Anis Chairi, Pengaruh Konflik Dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Semarang), Undip, Harian Pikiran Rakyat, Bandung, 24 Oktober 2017.

Hasil kajian Tim Analisa dan Evaluasi Penanggulangan Bencana, sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor : PHN 65-HN-01.06 Tahun 2011, tanggal 9 Maret 2011, hal 2

Ito Hediarto, Armaidly Armawi, Edhi Martono, Jurnal Ketahanan Nasional, UGM, 2016, Optimalisasi Peran Kodim Dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Kodim 0613/Ciamis, Jawa Barat) dari <http://jurnal.ugm.ac.id/JKN>, diakses pd tgl 11 feb 2017.

James Panjaitan, Institut Teknologi Bandung, 2008, Konsepsi Pelibatan Tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI Dalam Penanggulangan Bencana (Studi Kasus : Operasi Bhakti TNI Pasca Bencana Gempa di Nias, 2005) dari https://www.academia.edu/24542228/KONSEPSI_PELIBATAN_TUGAS_OPERASI_MILITER_SELAIN_PERANG_OMSP_TNI_DALAM_PENANGGULANGAN_BENCANA?auto=download, diakses pd tgl 11 feb 2017, Kabupaten Indramayu Dalam Angka, 2017, hal 37.

Kecamatan dalam angka, 2011 dalam Penyusunan strategi dan model pengembangan kawasan perkotaan dan di pedesaan PKW Indramayu, hal III-3 (<https://www.slideshare.net/DandiRustandi/bab-3-gambaran>)

Kep. Panglima TNI No Kep/474/VII/2012 tgl 5 Juli 2012 tentang Doktrin TNI Tridek (Naskah Sementara).

Kep. Kasad No Kep/480/XII/2013, tgl 4 Des 2013, Doktrin TNI AD, Kartika Eka Paksi, lampiran A-7.

- Kep. Kasad No KEP/591/VIII/2017 tgl 9 Agustus 2017, Doktrin Kartika Eka Paksi.
- M. Nasir, Metode Penelitian, 1988, hal 111 dari <http://teori-ilmupemerintahan.blogspot.co.id/2011/06/pengertian-studi-kepuustakaan.html?m=1>, diunduh pada tanggal 21 Des 2017, pkl 20.05 wib
- Majalah Forum, Asia Pasific Defense, vol 37, terbitan ke-2, 2012, hal 13.
- Mabes TNI AD, Buku Petunjuk Induk tentang Pembinaan Teritorial No. 201.05- 111116 PI : Ter-01.a tahun 2007, hal 10.
- Mabes TNI, Buku Petunjuk Lapangan tentang OMSP, Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/364/X/2004 tanggal 4 Oktober 2004, hal 2-3.
- Pedoman Nasional Manajemen Bencana di Indonesia, Kemendikpolhukam RI, Juli 2005, hal 5.
- Perkasad no Perkasad/74/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009, Bujukops tentang Pembinaan Teritorial, hal 1.
- Perkasad no Perkasad/18/IV/2008 tanggal 8 April 2008, dan revisi Perkasad nomor Perkasad November 2008, tentang Orgas Kodim, hal 1.
- Permenhan RI Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tugas Bantuan TNI kepada Pemerintahan Di Daerah, hal 5.
- Perkasad nomor Perkasad/91/XI/2009 tanggal 30 November 2009, PP: OPS- 11.06, Bujuklak tentang Pedoman Pembantuan TNI AD kepada Pemerintah Daerah, hal 16-17.
- Program Kerja Kodim 0616/Imy TA. 2017. Protap Kodim 0616/Indramayu Nomor : 17 / PROTAP / I /2017, Januari 2017 tentang Protap Penanggulangan Bencana Alam Banjir.
- Program Binter Kodim 0616/Indramayu TA. 2017, Maret 2017 Rencana kegiatan program Gerakan Nasional Indonesia Bersih (GNIB) Dim 0616/Indramayu semester I TA. 2017, Maret 2017
- Rencana Penanggulangan Bencana Alam Banjir Kodim 0616/Indramayu, Januari 2017.
- Renbinter Kodim 0616/Indramayu TA. 2017, Maret 2017.
- Rencana Kontijensi Gempa Provinsi Jabar, 2016, hal 14.
- Ristrini, Rukmini dan Oktarina, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan vol 15 no 1, Jan 2012, hal 92.
- Ryamirzad Ryacudu, Doktrin Pertahanan Negara, 2015, hal 44.
- Ryamirzad Ryacudu, Strategi Pertahanan Negara, 2015, hal 96-97.
- Syamsul Ma'arif, Kalakhar Bakornas, Bahan ceramah Pasis Dikreg XLV, Seskoad, tgl 26 April 2007.
- Sundoro Agung Nugroho, Jurnal Pertahanan tentang Analisis Kerjasama Sipil-Militer dalam bantuan kemanusiaan di Indonesia: Studi kasus masa tanggap darurat penanggulangan bencana alam letusan gunung Merapi 2010, Mei 2012, vol 2, nomor 2, hal 161-162.
- Telaahan Binter Kodim 0616/Indramayu TA. 2017, Maret 2017.
- Tim Peneliti LP2M Unhan, Lap. Hasil Penelitian Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas di Kota

- Madya Padang-Sumatera Barat, Jakarta, Oktober 2014.
- United Nations International Strategy for Disaster Reduction – UN ISDR , 2004.
- UU RI nomor 24 tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana, Bab I Ketentuan umum, hal 3.
- UU nomor 23 / Prp tahun 1959 tentang Keadaan bahaya.
- Berita online Poskota News, Senin 3 Februari 2014, dari <http://poskotanews.com/2014/02/03/diterjang-banjir-700-rumah-rusak/>, diakses pada tgl 7 Feb 2017.
- Berita online Radar Cirebon, Selasa 11 Februari 2014, dari <http://www.radarcirebon.com/bupati-apresiasi-kesigapan-tni.html>, di akses pada tgl 7 Feb 2017.
- Berita online Bandung Jawa Barat, 10 Juli 2012, dari <https://bandungjawabarat.wordpress.com/2012/07/10/bencana-banjir-indramayu/> diakses pd tgl 15 feb 2017.
- Berita online Republika News, Rabu, 28 Desember 2016, dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/12/28/oiw6hf359-bencana-2016-di-indramayu-didominasi-banjir-rob>, diakses pd tgl 15 Feb 2017.
- Media Kreatif dan Budaya, Ranggong Seni, Indramayu dari <https://meneerpanqi.blogspot.co.id/2016/02/banjir-indramayu-musibah-lintas-zaman.html>, diakses pd tgl 15 Feb 2017.
- Suharsini Arikunto dari <https://www.scribd.com/mobile/doc> , diunduh pada tgl 21 Desember 2017, pkl 22.30 wib.
- <http://dmc.kemhan.go.id/post-mengkaji-manajemen-bencana-berbasis-pertahanan-pada-universitas-pertahanan.html>, diakses pd tanggal 23 Jan 2017
- http://eprints.walisongo.ac.id/154/3/061211026_Bab2.pdf, http://bpbd.indramayukab.go.id/jumlah-pegawai/https://www.academia.edu/24542228/konsepsi_pelibatan_tugas_operasi_militer_selain_perang_omsp_TNI_dalam_penanggulangan_bencana?auto=download, diakses pada 23 Jan 2017.
- <http://desawirausaha.blogspot.com/2015/11/jumlah-dan-nama-nama-desa-kelurahan-di-kabupaten-indramayuprovinci-jawa-barat-menurut-permendagri-nomor-56-tahun-2015.html>, diakses pada 15 Feb 2017.
- <http://bappedaindramayu.madebychocaholic.com/geografis>.
- <http://kbbi.web.id/banjir>.
- <http://www.sumberpengetahuan.com/2016/11/3-jenis-banjir-dan-pengertiannya-menurut-para-ahli-lengkap.html>.
- <http://www.jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1052>.
- <https://www.google.com/search?q=SUNGAI+di++INDRAMAYU>
- <http://www.bnpb.go.id/berita/2228/indonesia-led-shepherd-pada-mcpa-ke-4-di-kawasan-asean>, diakses pd tgggl 30 Juni 2016, pkl 15.35 wib.
- <http://prb-indo.blogspot.co.id/2010/06/paradigma-yang-perlu-berubah.html?m=1>
- <https://meneerpanqi.blogspot.co.id> diakses pd tgl 7 Nov 2107 pkl 11.30 wit.

<http://bisniskeuangan.kompas.com>,
diunduh pd tanggal 4 Desember
2017 pkl 11.30 wit

<https://www.scribd.com/mobile/doc>,
diunduh pd tgl 21 Desember 2017,
pkl 17.45